

25 Maret 2023



NEGARA HUKUM DAN HAM

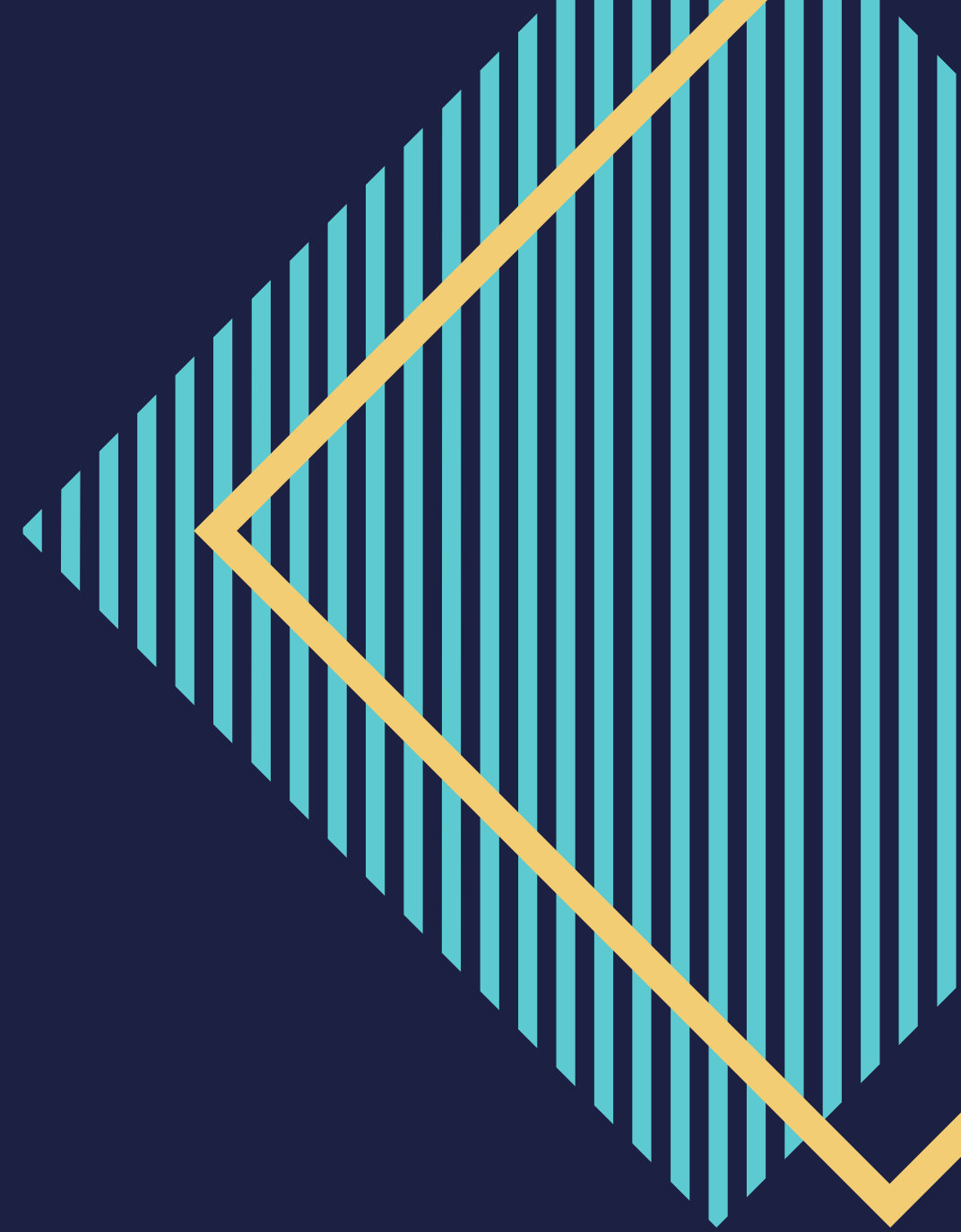
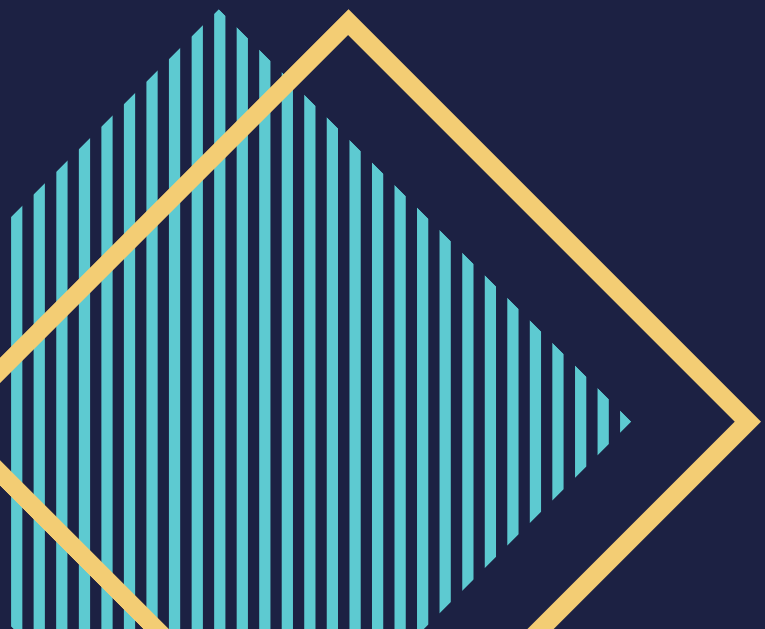
KELOMPOK 3



POKOK BAHASAN

Konsep dan Ciri Negara Hukum
Hukum di Indonesia
Hakikat HAM
Sejarah Perkembangan HAM
HAM di Indonesia

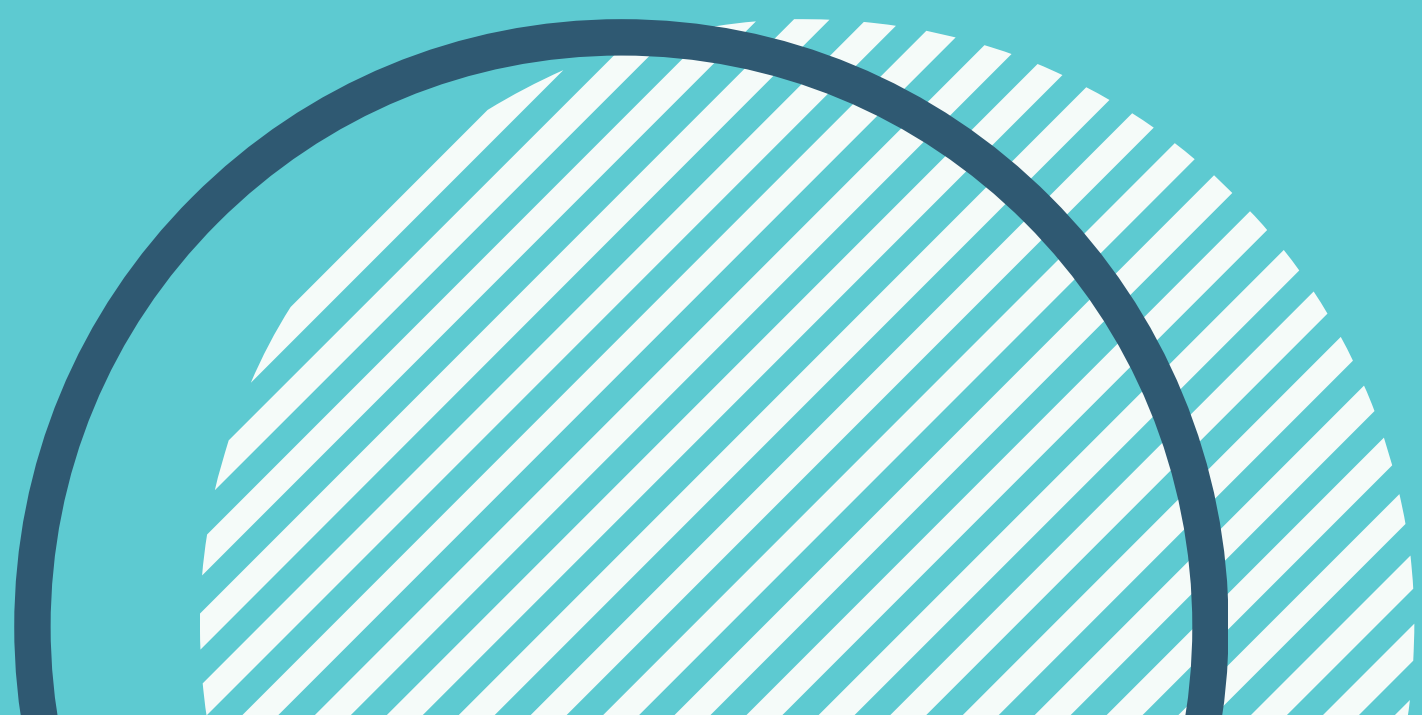
APA ITU HUKUM?



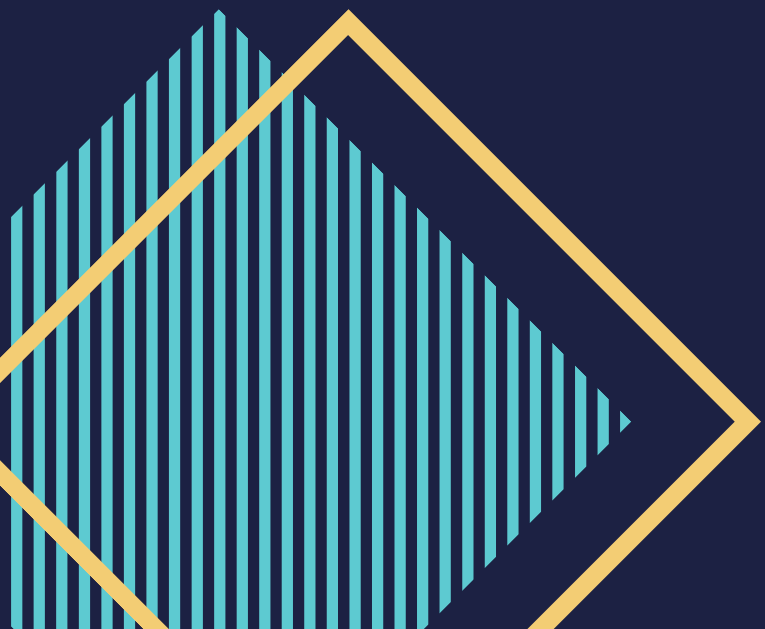
Konsep hukum adalah prinsip-prinsip atau gagasan dasar yang membentuk landasan filosofis dan teoretis dari sistem hukum dan praktik hukum.

Hukum adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Negara hukum adalah sebuah negara di mana aturan hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pejabat pemerintah dan warga negara biasa.



CIRI CIRI NEGARA HUKUM





TIDAK ADA YANG KEBAL HUKUM


semua harus tunduk pada hukum.

UNDANG-UNDANG YANG JELAS
DAN BERLAKU UNTUK SEMUA
ORANG

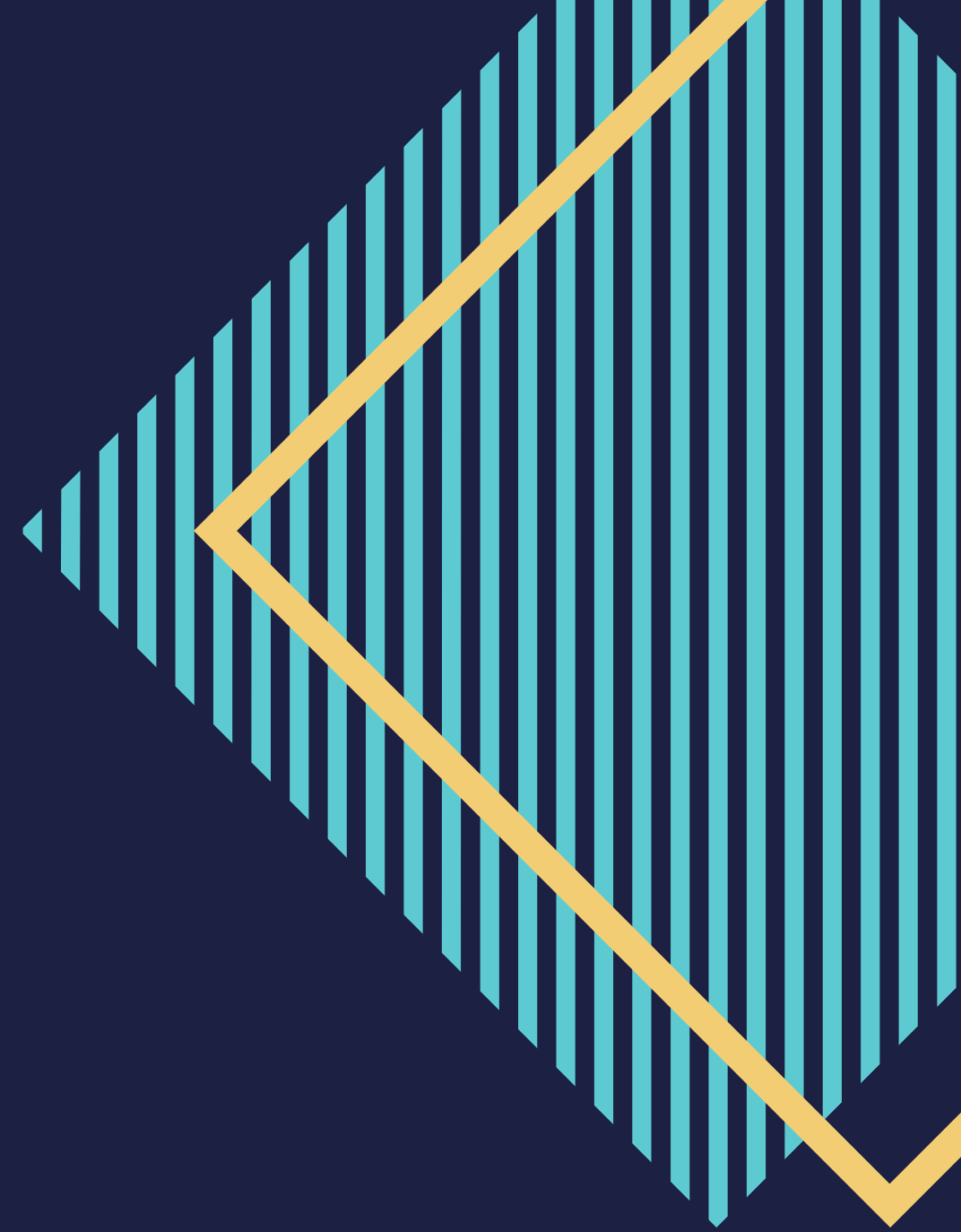
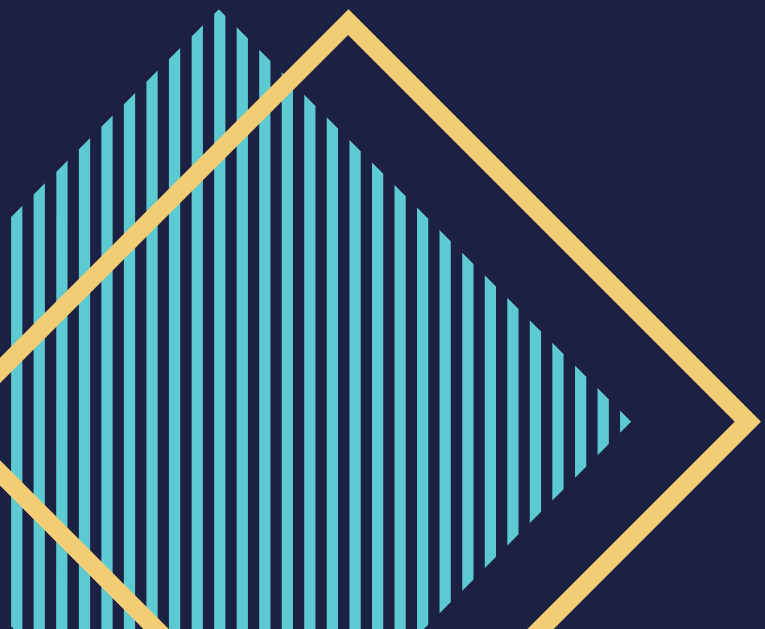
Semua orang harus mematuhi hukum tersebut,
dan mereka yang melanggar hukum akan
dikenai sanksi yang sesuai.

ADANYA HAM

Adanya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM)




HUKUM DI INDONESIA



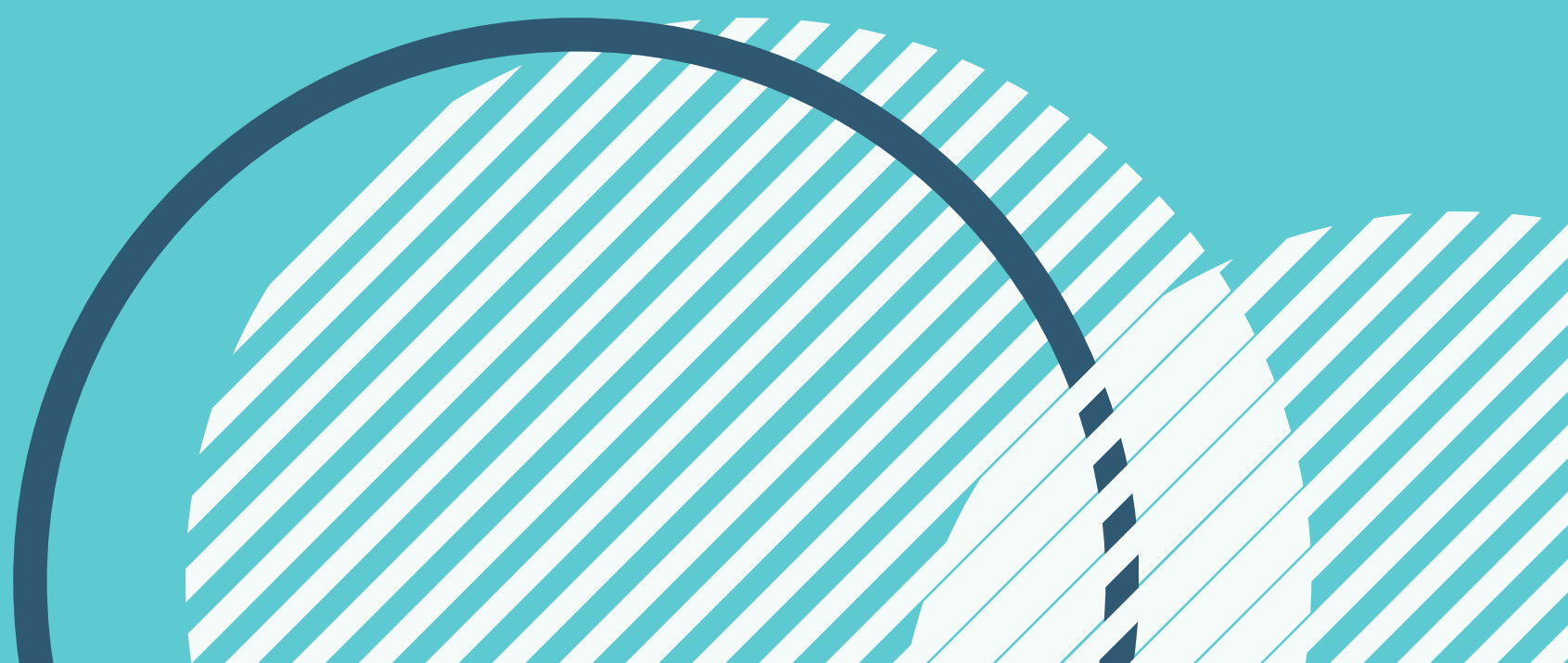
Negara Hukum Indonesia adalah sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Konsep Negara Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".



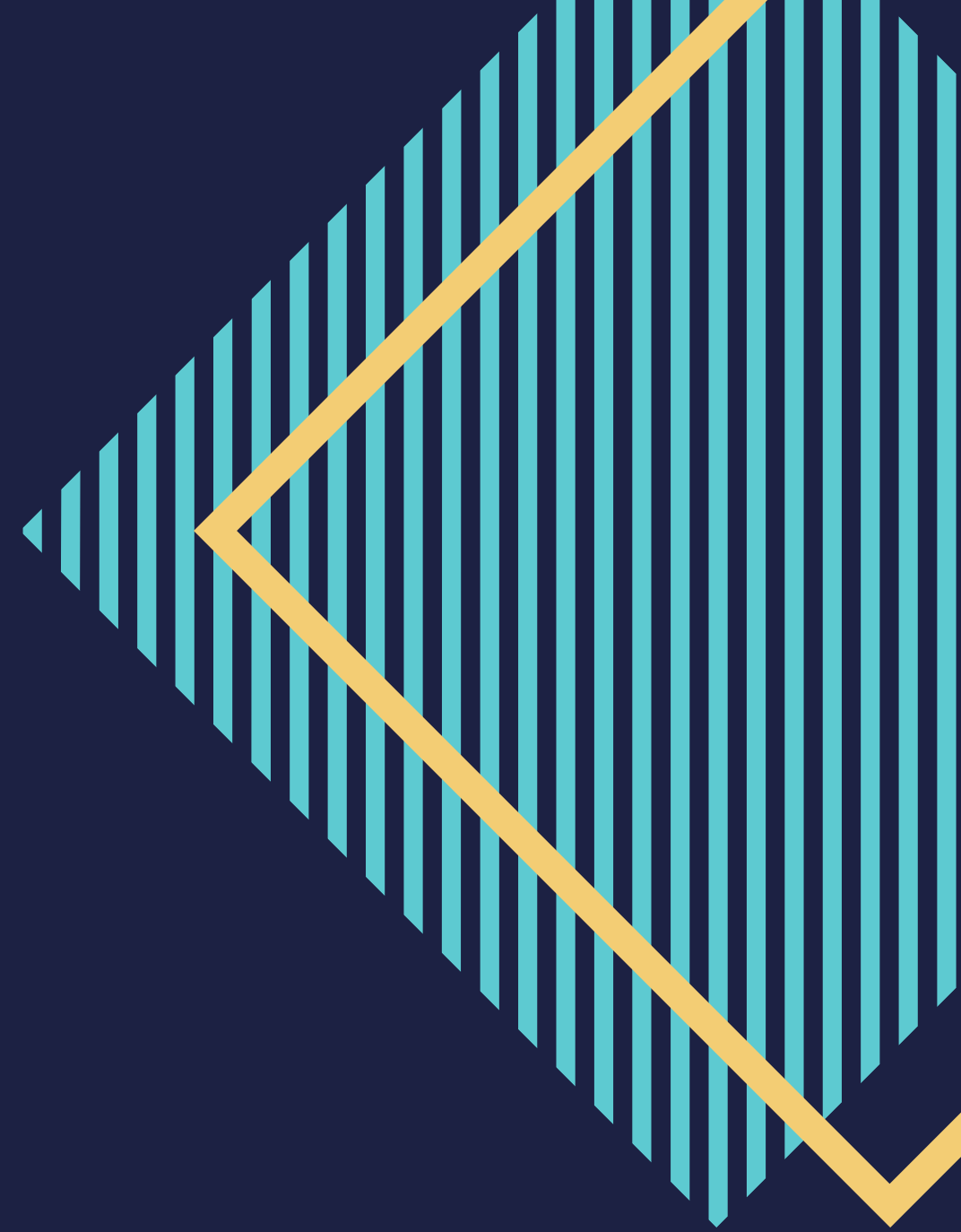
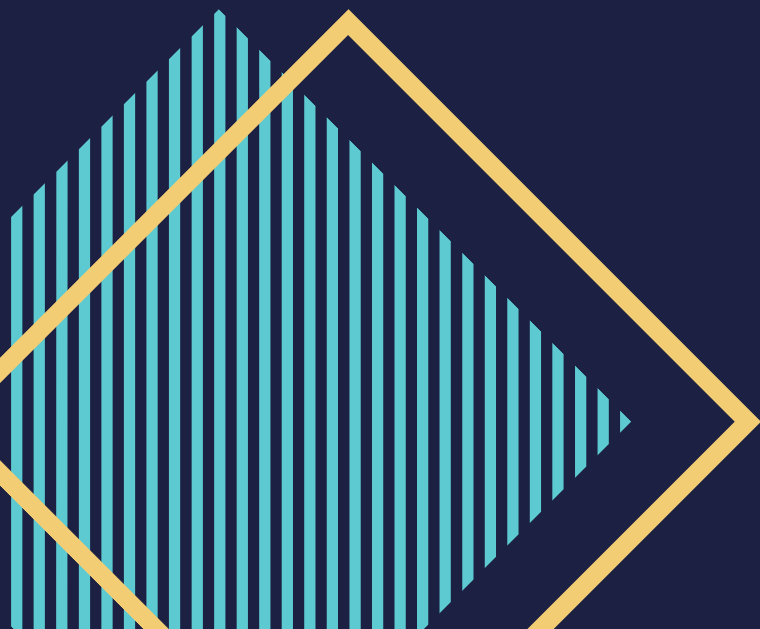


Indonesia memiliki sistem hukum yang berbasis pada hukum positif, yaitu hukum yang berdasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sah. Sistem hukum Indonesia juga terdiri dari beberapa jenis hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional

.Dalam menjalankan sistem hukumnya, Indonesia juga mengakui hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak untuk mengajukan petisi. Namun, seperti negara lainnya, implementasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia terus menghadapi tantangan.



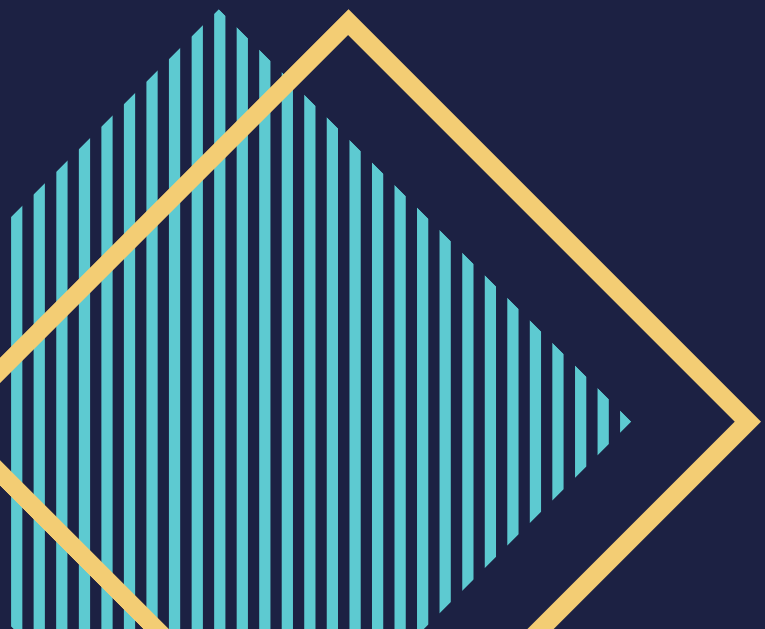
HAKIKAT HAM





- HAM pada intinya merupakan hak yang bersumber dari Tuhan. Sementara hak dasar tidak lain adalah hak-hak yang diberikan kepada warga negara guna menciptakan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, dan dinamis. Oleh karenanya, hak-hak yang ada pada konstitusi Indonesia telah membaurkan antara keduanya.
- Sebagai contoh: Norma-norma yang terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945 yang salah satunya tentang kebebasan berbicara/mengemukakan pendapat sejatinya adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diberikan Tuhan, sehingga dalam hal ini peran negara hadir sebagai pihak yang kemudian menjamin hak tersebut didapatkan setiap warga negara dengan pemenuhan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

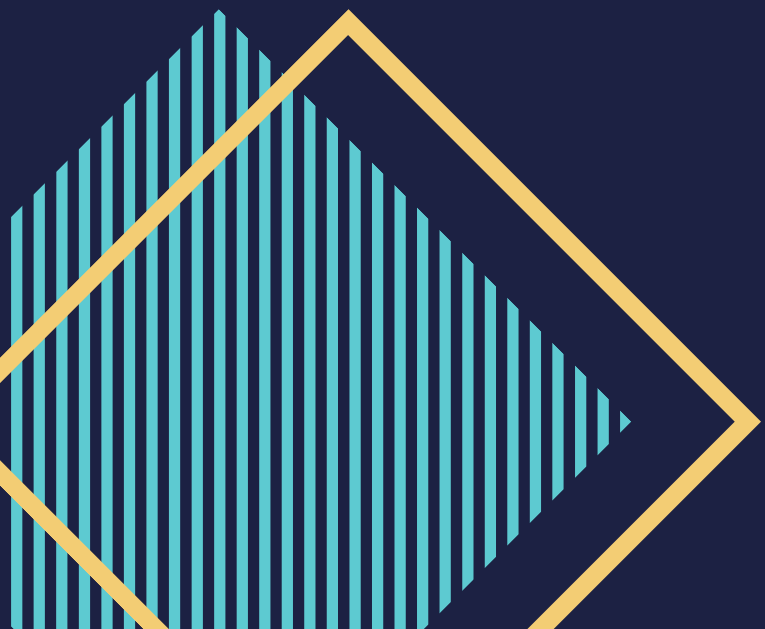
SEJARAH PERKEMBANGAN HAM






- Sejarah HAM dimulai sejak zaman kuno di mana konsep dasar tentang hak-hak manusia telah muncul di banyak peradaban. Namun, perkembangan modern dari konsep HAM dimulai pada abad ke-18 selama Revolusi Prancis, di mana deklarasi hak asasi manusia dan warga negara diterbitkan pada tahun 1789.
- Pada abad ke-20, perhatian dunia internasional terhadap HAM semakin meningkat setelah Perang Dunia II dan kekejaman yang dilakukan selama Perang. Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan hak-hak dasar yang harus dihormati oleh semua negara.
- Setelah itu, banyak negara mulai memasukkan perlindungan HAM ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka, serta membentuk badan-badan untuk memantau pelanggaran HAM. Namun, pelanggaran HAM masih terjadi di seluruh dunia dan menjadi isu global yang terus dipertanyakan dan diperjuangkan hingga saat ini.

HAM DI INDONESIA





- Di Indonesia, sejarah HAM dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1945, di mana hak-hak dasar manusia diakui dalam konstitusi. Namun, pengakuan formal terhadap HAM baru muncul dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan hak-hak dasar seperti hak atas hidup, kebebasan, dan persamaan di hadapan hukum.
- Selama era Orde Baru (1965–1998), pelanggaran HAM terjadi secara sistematis dan meluas, terutama pada masa-masa awal pemerintahan. Namun, setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, reformasi politik dimulai dan pengakuan terhadap HAM mulai ditingkatkan.
- Pada tahun 1999, Indonesia memperoleh status anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengadopsi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi landasan bagi penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, berbagai badan dan lembaga, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, telah didirikan untuk melindungi dan mempromosikan HAM di Indonesia.

- 
- Meskipun demikian, pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi, hak atas tanah, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan HAM tetap menjadi tantangan bagi Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan